

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa kegiatan penagihan yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur yang didasarkan pula pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah. Dari pembahasan tersebut, prosedur atas pelaksanaan kegiatan penagihan PKB oleh UPT PPD Surabaya Utara adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pendataan dan Penetapan melakukan cetak SPSOPKB, NPPKB, dan NTPKB melalui sistem atau aplikasi “Cetak Surat Tagihan PKB”
2. Bagian Pendataan dan Penetapan memisahkan dan mengelompokkan dokumen tercetak berdasarkan kelompok atau jenis surat tagihan, jenis kendaraan dan kecamatan pada surat tagihan.
3. Bagian Pendataan dan Penetapan menyerahkan dokumen tercetak kepada Bagian Pembayaran dan Penagihan
4. Bagian Pembayaran dan Penagihan membuat Lembar Produksi Dinas Luar
5. Bagian Pembayaran dan Penagihan mendistribusikan SPSOPKB, NPPKB, dan NTPKB kepada Petugas Dinas Luar
6. Petugas Dinas Luar melakukan kegiatan dinas luar yaitu distribusi surat tagihan tercetak atau penagihan kepada Wajib Pajak.

7. Petugas Dinas Luar melakukan 'ENTRY' dan 'STATUS' terhadap hasil kegiatan dinas luar
8. Petugas Dinas Luar menyerahkan hasil dinas luar kepada Bagian Pembayaran dan Penagihan
9. Bagian Pembayaran dan Penagihan melakukan kegiatan arsip dokumen hasil dinas luar

Kegiatan penagihan atas tunggakan atau tagihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara tersebut berjalan cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara data target atas PKB dan realisasi penerimaan yang telah diterima. Selain itu, tingkat keefektifan juga dapat dinilai dari jumlah atas percetakan dokumen penagihan pajak kendaraan bermotor yang mengalami penurunan pada jenis dokumen penagihan yang tercetak.

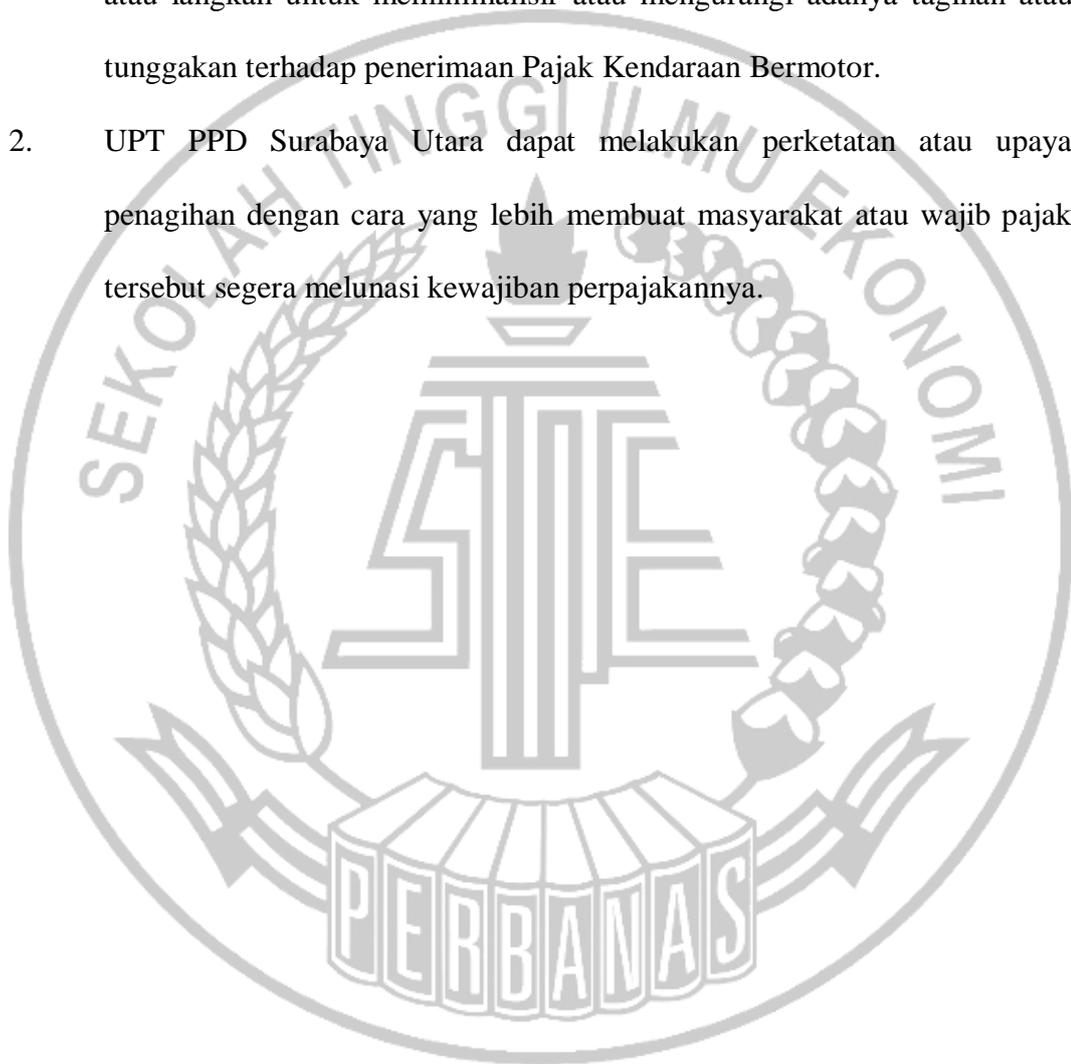
5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai Prosedur Penagihan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Surabaya Utara, saran untuk peneliti selanjutnya yang menjadikan tugas akhir ini sebagai referensi yaitu:

1. Mengambil topik atau permasalahan yang sejenis dengan objek penelitian atau unit lain yang sejenis.
2. Menggunakan topik mengenai prosedur penagihan atas subjek penelitian atau subjek penagihan yang lain.

Adapun implikasi penelitian dari tugas akhir ini, mengingat pentingnya memenuhi atau mencapai salah satu komponen PAD yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan umum yaitu:

1. Pihak UPT PPD Surabaya Utara kiranya dapat melakukan sejumlah cara atau langkah untuk meminimalisir atau mengurangi adanya tagihan atau tunggakan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. UPT PPD Surabaya Utara dapat melakukan perketatan atau upaya penagihan dengan cara yang lebih membuat masyarakat atau wajib pajak tersebut segera melunasi kewajiban perpajakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- BapendaJatim. (2020). BAPENDA JATIM. Retrieved Mei 23,2020, from Bapenda Jatim Web Site : https://www.dipendajatim.go.id/?page_id=1361
- DJP.K. (2020). Direktorat Jenderal Pajak Retrieved Agustus 13,2020, from Direktorat Jenderal Pajak Web Site: <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> .
- IAI. (2019). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu* . Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: JDIH Kemenkeu.
- Jatim, P. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Jatim, P. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor*. Surabaya: JDIH Provinsi Jawa Timur.

- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Akuntansi* , 716.
- Kemenkeu.D (2019,109) DJP Kemenkeu. Retrieved April 8,2020, from DJPK Kemenkeu Website : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf
- Putri, A. R., & Jati, I. K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi* , 662.
- Romandana, A. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas* .
- Ruyadi. (2009). Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* , 61-70.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwarno, A. E., & Suhartiningsih. (2008). Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 163.

Waluyo. (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

